



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 18 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Ibukota Negara Djakarta-Raya merupakan Kota Internasional tempat dimana persoalan-persoalan Internasional dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Kebudajaan diselesaikan dalam rangka perdjoangan revolusioner, menentang Kolonialisme dan Imperialisme dunia ;
b. bahwa untuk membina keamanan Ibukota dalam fungsinja sebagai Kota Internasional, perlu kesanggupan-kesanggupan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia ditingkatkan, diperkembangkan, diperlengkapi serta dibina sebagai suatu Metropolitan Police ;
c. bahwa mendjelang persoalan-persoalan Internasional jang akan datang, jang diselenggarakan di Ibukota Djakarta-Raya, pembangunan suatu Metropolitan Police merupakan hal jang urgent dan perlu dimasukkan dalam projek-projek vital Mandataris M.P.R.S.
d. bahwa bersamaan dengan pembangunan Metropolitan Police itu perlu tugas, susunan dan wewenangnya diatur kembali ;
- Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S. No.VI/MPRS/1965 BAB I Pasal 2c ;
2. Undang-undang Moneter Tahun Anggaran 1966 Pasal 1 (2) dan Pasal 6 ;
3. Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membangun Komando Daerah Angkatan Kepolisian VII Djaya mendjadi Metropolitan Police jang Perentjanaan, persiapan dan pelaksanaan pembangunannya diselenggarakan oleh Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.
- KEDUA : Menjatakan sebagai Projek Mandataris M.P.R.S. atas pembangunan Metropolitan Police tersebut diatas dan merupakan sebagai projek vital sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 tentang pentjegahan dan/atau penutupan (lock-out) di Perusahaan-perusahaan, Djawatan-djawatan dan Badan-badan jang vital.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan susunan Metropolitan Police itu diatur dengan keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O